

**PEMBERIAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR MENYEBABKAN
DIBERIKANNYA TANDA KEHORMATAN VETERAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN
REPUBLIK INDONESIA**

Bayu Setiadharna

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing :

1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum
2. H. Sudarsono, S.H., M.S.

ABSTRAK

Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah tindakan MY yang memberikan keterangan yang tidak benar sehingga menyebabkan diberikannya tanda kehormatan veteran dapat dipidana atas dasar turut serta melakukan tindak pidana ditinjau dari UU No. 15 Tahun 2012. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Tindakan MY bersama-sama dengan MU memalsukan identitas guna keperluan penerbitan pemberian kehormatan veteran pejuang Kemerdekaan RI, telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 22 UU No. 15 Tahun 2012, sehingga MY dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), serta dicabut keveteranannya. MY dan MU telah memenuhi unsur Pasal 263 KUHP sehingga dapat dipidana , karena MY bertugas pada bagian pengurusan anggota veteran menerbitkan gelar kehormatan veteran pejuang Kemerdekaan RI, dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor Skep/830/ VI/1991 atas nama AB, padahal tidak pernah menjadi anggota Veteran. Surat Keputusan tersebut terbit dengan memalsu foto, dan pada formulir atau blangko permohonan tunjangan veteran Republik Indonesia. MY dan MU melakukan perbuatan melanggar Pasal 22 UU No. 15 Tahun 2012, perbuatannya dilakukan secara sengaja, perbuatannya bukan karena adanya daya paksaan, pembelaan terpaksa, tidak ada alasan pemaaf, sehingga pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana

Kata Kunci: Keterangan Tidak Benar, Tanda Kehormatan, Veteran.

ABSTRACT

Abstract - The purpose of writing this scientific journal is as a condition for graduation and earning a Bachelor of Laws degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. The Practical Purpose of writing this thesis is to be able to find out whether MY actions which provide incorrect information thus causing the awarding of veterans can be convicted on the basis of participating in committing criminal offenses in view of Law No. 15 of 2012. The following conclusions are obtained: MY actions together with MU falsified identity for the purpose of issuing honorary veterans honors for Indonesian Independence, fulfilling all elements of Article 22 of Law No. 15 of 2012, so MY can be sentenced to a maximum of 4 (four) years imprisonment and / or a maximum fine of Rp180,000,000.00 (one hundred eighty million rupiah), and revocation of the statute. MY and MU have fulfilled the elements of Article 263 of the Criminal Code so that they can be convicted, because MY served on the part of managing veteran members issued an honorary veteran title of the Indonesian Independence fighter, by issuing Decree Number Skep / 830 / VI / 1991 on behalf of AB, even though he was never a member Veteran. The Decree was published by faking photos, and on the form or blank application for veterans of the Republic of Indonesia. MY and MU have committed violations of Article 22 of Law No. 15 of 2012, his actions were carried out intentionally, his actions were not due to coercion, forced defense, there was no excuse for forgiveness, so that perpetrators could be held liable for criminal liability

Keywords: Incorrect Information, Honors, Veterans